



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN
SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
PERIODE 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

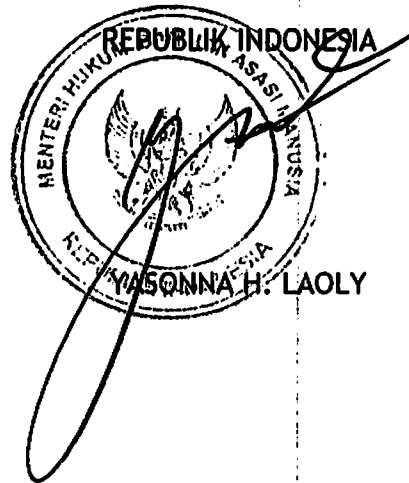
- Membaca : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 05/DPN PKP IND/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Permohonan Pengesahan Kepengurusan DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2020 dan Penyempurnaan AD ART Hasil Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan PERSATUAN INDONESIA PERIODE 2015-2020**
- PERTAMA** : Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Diponegoro No. 63, Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310. Telp: (021) 31922733 Fax. (021) 31922822 yang dinyatakan dengan Akta Tentang Perubahan dan Penegasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia No. 21 Tanggal 21 Mei 2015 serta Akta Tentang Pernyataan Keputusan Tim Formatur Kongres IV Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tahun 2015 Nomor 22 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Refizal, S.H, M.Hum. berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA** : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2013 tanggal 17 April 2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Nomor : M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2015

Tanggal : 15 JUNI 2015

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia
2015-2020

Ketua Umum : Letjen TNI (Purn.) Dr.(H.C.) Sutyoso, S.H.

Wakil Ketua Umum : Isran Noor

Wakil Ketua Umum : Ir. Samuel Samson, M.Si.

KETUA- KETUA

Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi : Jeffry Palijama, S.H.

Ketua Bidang Kewilayahan : Ir. H. Muhammad Nasir Nawawi

Ketua Bidang Legislator : Ashary Ali Agus, SE. M.M

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan : Drs. Zindar Kar Marbun, M.Sj, M.H.

Ketua Bidang Komunikasi, Media Massa dan Penggalangan Opini : Asmara Roni, B.E.

Ketua Bidang Ideologi, Politik dan Keamanan : Romulus S. Sihombing, S.H.

Ketua Bidang Ekonomi : Dr. Hotner Tampubolon, S.E, M.M.

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Suparta

Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia : Tjindra Parma, S.H, M.H.

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial : Ellen Sukmawati, S.H, M.Kn.

Ketua Bidang Pendidikan dan Keagamaan : Huala Siregar, S.H.

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak : Juanita L. Suling

Ketua Bidang Seni dan Budaya : Camelia Panduwinata Lubis, S.E.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Rully Soekarta
Ketua Bidang Tani dan Nelayan : Ir. Andreas Tanadjaja, M.M.
Ketua Bidang Buruh dan Tenaga Kerja : Ir. Daulat Sinuraya, M.B.A, M.M.
SEKRETARIS JENDERAL : H. Didi Supriyanto, S.H, M.Hum.

WAKIL-WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

Wakil Sekretaris Jenderal : H. Supratman, S.E, M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal : Uus Ali Husni, S.Kom.
Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. Takudaeng Parawansa
Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Safi'i Imam Saksono
Wakil Sekretaris Jenderal : Winarsih Dewi, S.H, S.E.

BENDAHARA UMUM

: Ie Kiang Ging (Cing-Cing)

WAKIL-WAKIL BENDAHARA UMUM

Wakil Bendahara Umum : Dra. Muthiah Alhasani
Wakil Bendahara Umum : Dewi Ayu Trisna
Wakil Bendahara Umum : Andi Walenreng, S.H.

KORWIL-KORWIL

Korwil I Wilayah Sumatera : Haryanto, S.H.
Korwil II Wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT : Ismail Ibrahim, S.H.
Korwil III Wilayah Kalimantan : Drs. Muslim Mashudi, M.B.A.
Korwil IV Wilayah Sulawesi : Safril Partang, S.H, M.H.
Korwil V Wilayah Maluku, Malut, Papua dan
Papbar : Upa Labuhari, S.H.

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Organisasi : Dr. Harapan Tarigan, S.E, S.H, M.M.
: Yos Huaniel Toding
: S. Fransiska H.M. Sinaga, S.H.
Departemen Kadersisasi dan Keanggotaan : Drs. Sarjono Jahidi
: Drs. Jisman Hutapea
: Drs. Deden Supriadi
: Abraham Oppier, S.E.

Departemen Pembinaan Legislator : Alina Maya Lengkong
: Karolus Paulus Sani Kleden, S.Sos.

Departemen Administrasi Legislator : Indri Yuli Hartati
: Wati Kus Endang, S.E.

Departemen Kajian Strategis : H. Amin Kias, S.H.
: Dr.(c) Syarifuddin Noor, S.H, M.H.

Departemen Penelitian dan Pengembangan : Ir. H. Muslimi, M.M.
: Bernaditha R. Yayuk Weking
: Pungki W.S, M.M.

○ Departemen Pendataan dan Statistik : Ir. Noni S. Christina Kune
: Hj. Susiana
: Sitha Mawarti

Departemen Hubungan Masyarakat : Leony Agustina Diani, S.E.
: Apri Novita
: Shahab Fadilah

Departemen Informasi dan Komunikasi : Ruslim Rohimun Sembiring
: Maladyna Laurensia
: A. Hermawan
: Rina Komala

○ Departemen Penggalangan Opini : Junita Tanudirja, S.H. M.Kom.
: Ir. Ishak R
: Tiara Larasati, S.Kom.

Departemen Ideologi : Samuel Parantean
: Tammy Cicillia

Departemen Politik dan Pemerintahan : M. Rusli Zamzami Said
: Dr. Koesnadi Notonogoro, S.H.
: Danny Agus Surono Sunaryadi, S.T.

Departemen Politik Luar Negeri : Muclis Bahsinar
: Drs. Firdaus Efendi, M.M.

Departemen Pertahanan dan Keamanan : Ir. Sabar Hotma Maruli Situmorang
: Leo Pandapotan Simangunsong
: Victor Gomies

Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Erwin Reza Bachtiar
: Wiwin Agustina (alias Ayu)

Departemen Koperasi : Agung Antonio Toding
: Jennifer Cynthia, M.M.
: Rina Luthfya, S.E.

Departemen Usaha Kecil dan Menengah : Sandjaja Darmawan
: Bandar Gultom
: Hj. Ping Nurlisa
: Reni Aprita

Departemen Perdagangan : Wahyu Raja Intan
: Mieske
: Axnes Sukmawati

Departemen Perindustrian : Benny Tjandra
: H. Said Saida, S.H.
: Jullya Feronica
: Eldora Yotasia

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral : Drs. Cening Widhiana, M.M.
: Yongky Milson Kaihatu
: Ana Legyanningsih

Departemen Hukum : Mustafa Kamal, S.H, M.H.
: Dara Farasita, S.H.
: Eva Fitriani, S.H.

Departemen Hak Asasi Manusia : Agung Sri Purnomo, S.H, M.H.
: Dra. Dyah Bintarini, M.M.
: Maryam Jenny Morin

Departemen Pemberantasan Korupsi, Mafia Hukum dan Narkoba : Hj. Mardiana, S.H.
: Destya Purna Panca, S.H.

Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana	: Luana Saskia, S.H. : Deasy Amelia, S.E.
Departemen Kesehatan	: dr. Myra Yohana Lengkong
Departemen Lingkungan Hidup	: Supardiyo, S.E. : Astrid Cinderella Bisara
Departemen Pendidikan dan Iptek	: Mustofa, M. Si. : R.A. Ayu Susanne A.W. Puspokusumo, Dip. Ing : Reny Lukman, S.Pd. : Vanda
Departemen Keagamaan	: H.M. Sodri : Roberd A.B. Selan, M.Pd, Ph.D.
Departemen Pemberdayaan Perempuan	: Anggraeni A. Nazar : Dyah Puspitasari : Dewi Anita Matrutty, S.E, M.M.
Departemen Perlindungan Anak	: Liring Duhita Dewi : Kemala Dewi, S.H, M.H. : Dewi Anggraeni, S.E, M.M.
Departemen Seni dan Budaya	: Nuno Guil Hermino Pacheco Magno, S.H, M.H, CLA. : Anneke Puspa Calliandra Matondang, S.I.A
Departemen Pemuda dan Olahraga	: Dimas Danindro : Raja Bona P. Saragih : Muhazir Burma : M. Reza Ramadhan
Departemen Tani	: Nanekram Harumal Nandwani : Shinta Santini Setyowati
Departemen Nelayan	: Edison Prapat : Dex Raranta
Departemen Perlindungan Tenaga Kerja	: Abdul Jabar, S.H. : Sugeng Friyanni

Departemen Pendayaan Tenaga Kerja : Drs. Pardaeen Simanjuntak, M.Si.

Departemen Pelatihan dan Produktivitas : Elvis Liyanto, S.E.

Tenaga Kerja : Dra. Hj. Yunani R.

KORDA/SETINGKAT DEPARTEMEN

Korda 1: Wilayah Aceh, Sumut & Riau : Indra Azmi, S.E.

Korda 2: Wilayah Sumbar & Kepri : Suparno P.R, M.B.A.

Korda 3: Wilayah Bengkulu & Jambi : Suyatno Hadiwibowo

Korda 4: Wilayah Sumsel, Babel & Lampung : Ir. Surya Chandra Salim

Korda 5: Wilayah Jabar, DKI & Banten : Drs. H. Purnawarman Kias, S.H.

Korda 6: Wilayah Jateng & DIY : Pius Gora

Korda 7: Wilayah Jatim & Bali : Heru Pragolo, S.H, M.H.

Korda 8: Wilayah Kalbar & Kalteng : Marselus Uthan, S.Sos.

Korda 9: Wilayah Kaltim, Kalsel & Kaltara : H. Eddy Wellianto, M.B.A.

Korda 10: Wilayah Sulut, Sulteng & Gorontalo : Ronald Pauner

Korda 11: Wilayah Sulsel, Sulbar & Sultra : Suzanna Kaharuddin, S.Sos.

Korda 12: Wilayah NTB & NTT : Drs. Yan R. Mboeik

Korda 13: Wilayah Maluku & Malut : Noya Lenda Meilani, S.H, M.H.

Korda 14: Wilayah Papua & Papbar : dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M. Kes.

Dewan Penasehat

Ketua : Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno

Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn.) Syaiful Sulun

Sekretaris : Dr. Ir. Djiteng Roedjito

Anggota : Mayjen TNI (Purn.) Haris Sudarno

Anggota : Lulu Lugiyati Edi Sudradjat

Anggota : Sri Herawati

Anggota : Bea Larasati Iskandar, S.Kom.

Anggota : Brigjen TNI (Purn.) Victor Phaing

Anggota : Buyung Atang Philiang

Dewan Pakar

- Ketua : Prof. Dr. Sri Edi Swasono
Wakil Ketua : Prof. Sodik
Sekretaris : Dr. Ir. Sumbangan Baja, M. Sc.
Anggota : Prof. Dr. Meutia Hatta
Anggota : Tjetje Hidayat Padmadinata
Anggota : Mayjen TNI (Purn.) Monang Siburian
Anggota : Dr. Pandji Hadinoto
Anggota : Prof. Dr. Rivai, M.B.A, M.Si
Anggota : dr. Romansyah Sahabuddin, S.E, M.Si
Anggota : Faisal Matriadi, S.E, M.Si.
Anggota : Wahyu Saputra, S.E.

Mahkamah Partai

- Ketua : Letjen TNI (Purn.) M. Yusuf Kartanegara, S.H.
Sekretaris : Rusdi Taher, S.H.
Anggota : Drs. Jimmy E. Jambak
Anggota : Marsdya TNI (Purn.) Budhy Santoso, S.E.
Anggota : Mayjen TNI (Purn.) Mashudi Darto

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA





**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

**KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA**

NOMOR : 61 / DPN PKP IND/VII/2015

**TENTANG
PENETAPAN SAUDARA DR. ISRAN NOOR
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
MASA BAKTI 2015-2020**

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

MENIMBANG

- : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Letjen TNI (Purn) DR (Hc) Sutiyoso, SH dari jabatan Ketua Umum DPN PKP INDONESIA periode 2015-2020, karena dipilih Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), agar kepemimpinan Partai secara nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya dipandang perlu ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2015.
- b bahwa Rapat Harian Pertama DPN PKP INDONESIA telah menetapkan Sdr. Dr. Isran Noor sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2020, yang kemudian pada Rapat Pleno Kedua DPN PKP INDONESIA ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2020.
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pengangkatan Sdr. Irsan Noor sebagai Plt. Ketua Umum DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2020 perlu disahkan dalam suatu keputusan.

MENINGAT

- : 1. Anggaran Dasar (AD) PKP INDONESIA Pasal 21 dan 22.

Berkas Untuk Rakyat

Sekretariat : Jl. Diponegoro No. 63, Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310, Telp. (021) 319 22 733 Fax. (021) 319 22 822

E-mail : jkarta2002@yahoo.com, Website: [Http://www.pkpi.or.id](http://www.pkpi.or.id)

Website: [Http://www.pkpindonesia.or.id](http://www.pkpindonesia.or.id),

2. Keputusan Formatur Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015 No.01/ FORMATUR KONGRES/ 2015 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2015-2020.

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Rapat Harian Pertama DPN PKP INDONESIA tanggal 1 Juni 2015;
2. Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Kedua DPN PKP INDONESIA tanggal 6 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengesahkan Sdr. Dr. ISRAN NOOR sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Ketua Umum DPN PKP INDONESIA Periode 2015-2020.

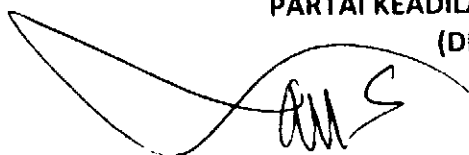
Kedua : Tugas Plt. Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai kekuasaan penuh sebagai Ketua Umum, dan bertugas sampai dengan terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) PKP INDONESIA yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Agustus 2015.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 8 Juli 2015

=====

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**



SEMUEL SAMSON
Wakil Ketua Umum



DIDI SUPRIYANTO
Sekretaris Jenderal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 52962545 Faksimili (021) 52962545

Nomor : AHU.4.AH.11.01-30
Lampiran :
Perihal : Pengangkatan Plt. Ketua Umum

Jakarta, 14 Juli 2015

Kepada
Yth. Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Jl. Diponegoro No. 63 Menteng
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 94/DPN PKP IND/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada pokoknya dalam surat disampaikan laporan bahwa sehubungan dengan pengajuan Bapak Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) oleh Presiden kepada DPR, maka untuk menjaga netralitas kelembagaan BIN serta agar yang bersangkutan lebih fokus menjalankan tugasnya maka beliau telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum DPN PKP Indonesia periode 2015-2020.
2. Atas pengunduran diri Bapak Sutiyoso tersebut DPN PKP Indonesia telah melakukan Rapat Harian pada tanggal 1 Juli 2015 yang memutuskan untuk menyetujui pengunduran diri Bapak Sutiyoso dari jabatan Ketua Umum PKP Indonesia periode 2015-2020 dan menunjuk **Bpk. Isran Noor** sebagai Pelaksana (Plt) Ketua Umum DPN PKP Indonesia periode 2015-2020 yang selanjutnya telah dikukuhkan dalam rapat pleno DPN PKP Indonesia pada tanggal 6 Juli 2015 yang akan bertugas sampai dengan dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PKP Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Agustus 2015.
3. Terlampir bersama surat tersebut antara lain :
 - a) Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 61/DPN PKP IND/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Penetapan Saudara DR. Isran Noor Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Masa Bakti 2015 – 2020 (asli);
 - b) Berita Acara Keputusan Rapat Harian Pertama DPN-PKP Indonesia tanggal 1 Juli 2015;
 - c) Daftar Hadir Rapat Pengurus Harian DPN PKP Indonesia Periode 2015 – 2020 Hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 tempat Kantor DPN PKP Indonesia (*fotocopy*);
 - d) Berita Acara Keputusan Rapat Harian Pertama DPN PKP Indonesia tanggal 6 Juli 2015 (asli);

- e) Daftar Hadir Rapat Pleno Kedua Pengurus DPN PKP Indonesia Periode 2015 – 2020 Hari Senin tanggal 6 Juli 2015 tempat Hotel Sahid Jaya Ruang Puri Ratna (*fotocopy*).

Bahwa atas laporan tersebut telah kami catat dan tindaklanjuti secara administratif sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


**Ap. Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum
Direktur Tata Negara**

**Tjandra Bana Sitepu, S.H., M.Hum
NIP. 19570606 197803 1 001**

Tembusan disampaikan kepada:

- Dirjen Administrasi Hukum Umm (Sebagai laporan)